



Pengaturan Lalin Saat Malam Tahun Baru di Jalan Malioboro
Mobil Tak Boleh Masuk Mulai Pukul 18.00

YOGYA, TRIBUN - Kepolisian Resor Kota Yogyakarta akan memberlakukan sistem pengaturan lalu lintas buka tutup di Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, saat perayaan malam Tahun Baru 2015.

"Kami akan berlakukan sistem buka tutup untuk mengantisipasi kepadatan; dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merayakan malam tahun baru dengan lebih nyaman di Malioboro," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Kombes (Pol) Slamet Santoso, sesuai mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta, Jumat (19/12).

Menurut dia, kepolisian akan mulai melarang kendaraan roda empat melintas di Malioboro mulai pukul 18.00 dan kendaraan roda dua dilarang melintas mulai pukul 21.00.

Meskipun demikian, kendaraan masih bisa memanfaatkan jalan-jalan sirip yang ada untuk akses keluar masuk.

"Pemerintah Kota Yogyakarta juga berencana menempatkan sejumlah toilet portabel di sepanjang Malioboro. Mudah-mudahan, tidak ada lagi warga yang pingsan akibat berdesak-desakan saat merayakan tahun baru di Malioboro," tutur Slamet.

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta juga akan membuka empat pos pengamanan lalu lintas yang terletak di simpang Jalan Gejayan, Teteg Sepur Malioboro, Titik Nol Kilometer dan di simpang Gembira Loka Zoo.

Selain itu, kepolisian juga akan membuka tujuh pos pengamanan gereja di antaranya di Gereja Kotabaru, Pugeran, Bintaran, Lodji Kecil dan Jetis. Di Kota Yogyakarta terdapat 56 gereja yang terdiri dari tujuh gereja besar dan sisanya gereja kecil.

Di tiap titik pos pengamanan, akan disiagakan ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan derek, dan gergaji mesin. "Kami juga berkoordinasi dengan PLN, PDAM, BI, PT KAI dan Terminal Giwangan. Semuanya siap mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Total personel yang disiagakan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2015 adalah 900 petugas dan akan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan, TNI dan organisasi kemasyarakatan, serta Pramuka.

"Jika digabung, total personel yang akan mengamankan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta bisa mencapai 1.500 orang," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap, warga dapat menggalakkan kegiatan siskamling di lingkungan rumahnya masing-masing untuk mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi.

"Kehati-hatian dan kewaspadaan harus terus dijaga dan ditingkatkan untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin timbul," katanya.(ant)

lainnya. Bayu mengatakan, tempat usaha yang terjaring razia mulai dari usaha skala kecil hingga besar.

Razia digiatkan guna menegakkan Peraturan Daerah (Perda) 8 tahun 2012, tentang Izin Gangguan. Tim yustisi menggelar razia ke sejumlah tempat usaha yang disinyalir tidak mengantongi izin resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Karena banyaknya tempat usaha baru, maka petugas Satpol PP terpaksa melibatkan aparat di tingkat kelurahan.

"Sekarang makin bertambah tempat usaha di tengah permukiman penduduk. Kami juga berharap aparat kelurahan diharapkan bisa membantu pemilik usaha untuk mengurus izin," katanya.

Menurut Bayu, kesadaran pemilik usaha untuk mengurus HO masih rendah. Dia mencontohkan, ketika menggelar operasi pra-yustisi di sepanjang Jalan Bantul, ditemukan sebuah apotek yang sudah lama beroperasi, namun hingga saat ini belum memiliki HO. Ada juga klinik gigi dalam izin operasionalnya masih menggunakan nama klinik pengobatan. "Padahal praktiknya membuka usaha klinik gigi itu sudah bertentangan sehingga harus mengganti jenis izin usahanya," ungkap Bayu.

Selain itu, petugas menemukan usaha belum berizin kebanyakan minimarket waralaba yang ada di Kota Yogyakarta. Beberapa temuan di antaranya minimarket waralaba di Jalan HOS Crokroaminoto, Jalan Bhayangkara, Stasiun Tugu dan Jalan Prof Herman Yohanes.

Para pelaku usaha itu diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Apabila tidak mengindahkan, maka akan dilakukan penyegelean hingga penutupan usaha secara paksa.

"Tapi ada yang tidak sampai surat peringatan ketiga. Mereka sudah mengurus izin HO, atau pernah juga yang tidak mengurus dan akhirnya memilih tutup," ujarnya. (tea)

Tidak Lanjut

1. Iyegawai
 2. Positif
 3. Cegera Untuk Diketahui

Jika Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005